

Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Tahun 2014-2016

Analysis Effects of Corporate Governance and Financial Performance Towards Tax Avoidance in Manufacturing Companies from Year 2014 until 2016

Fairuz Afifah dan Djuminah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
fairuzafifah@gmail.com

ABSTRACT

This study has goals to discover the impact of by corporate governance and financial performance toward tax avoidance practices in manufacturing companies which listed in Indonesian stock exchange website thru year 2014 until 2016. Purposive sampling technique has resulted 66 companies for each year and 198 in the total for being as samples. The study implements two different models with different measurement for dependent variable in each model. The usage of two different model intends to catch sight of comparison from both models and obtains result with comprehensive perspective. Multiple regression was executed in data analysis with assistance of Eviews9 software. Output of this study represents the absence of significant impact from all of proxies that used to measure corporate governance which are audit quality, proportion of independent commissioner and institutional ownership toward tax avoidance that measured using ETR and CETR. At the same time, financial performance that measured by ROA represents negative significant impact toward tax avoidance both measured by ETR as well as measured by CETR

Keyword: *etr, cetr, tax avoidance, corporate governance*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang pendapatan negaranya sebagian besar berasal dari pajak. Berdasarkan data Realisasi APBN, tahun 2014 pajak menyumbang 76,4% untuk total pendapatan negara terjadi peningkatan di tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 82,4% dan 82,6%. Tetapi jika dilihat persentase realisasi APBN di sektor perpajakan sendiri, angka realisasi pendapatan negara dari sector penerimaan perpajakan lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain yaitu sektor penerimaan bukan pajak dan sektor hibah (Dijerja, 2017).

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di tahun 2016, pemerintah menetapkan pajak penghasilan badan dengan tarif 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan. Pengecualian diperuntukkan bagi perusahaan dalam negeri yang memperdagangkan sahamnya minimal 40% dan pemilik saham tersebut haruslah paling sedikit 300 pihak yang masing-masing pihak tingkat kepemilikannya hanya diperbolehkan kurang dari 5% dari keseluruhan saham akan mendapat keringanan tarif menjadi 20% (Ortax, 2016). Karena pajak yang sifatnya memaksa, membuat banyak pihak yang melakukan usaha lain untuk meminimalisir pembayaran pajaknya namun tanpa melanggar peraturan yang ada dan

usaha yang dilakukan diantaranya dengan *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah langkah yang dilakukan dengan memanfaatkan *loopholes* ketentuan pajak di satu negara dalam rangka meminimalkan angka dari beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Darussalam & Septriadi, 2009). Pada tahun 2015, Bambang Brodjonegoro yang menjabat sebagai menteri keuangan pada saat itu, menyatakan ada 4000 Penanam Modal Asing (PMA) yang melaporkan mengalami kerugian tetapi operasional perusahaan tersebut masih tetap berjalan di Indonesia dan PPATK diminta untuk menelusuri hal tersebut karena karena pengakuan kerugian oleh PMA tersebut termasuk salah satu upaya *tax avoidance*. (Perkasa, n.d.). Perusahaan besar sekelas Google pun tidak luput dari aktivitas menghindari pajak. *Google* tidak mendirikan kantor operasionalnya di Indonesia tetapi memilih Singapura yang memiliki tarif pajak badan lebih rendah yaitu 17%. Meskipun di Indonesia berdiri kantor *Google*, itu hanyalah *marketing support* dan tidak dapat di justifikasi sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) sehingga *Google* tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu wajib pajak di Indonesia.

Keterbatasan akses untuk mendapat Surat Pemberitahuan Pajak tiap perusahaan membuat penentuan ukuran *tax avoidance* menjadi sulit. Maka dari itu proksi pengukuran dibutuhkan untuk mengukur *tax avoidance* perusahaan yang pada penelitian ini di proksikan oleh *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak oleh pihak perusahaan dalam periode tertentu dibagi dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak dan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu total beban pajak dibagi dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak (Dyrenge et.al 2010). Pemenuhan aturan perpajakan termasuk aktivitas merencanakan skema pajak sebuah perusahaan dipengaruhi oleh sistem *corporate governance* dan budaya dalam perusahaan tersebut (Friese, Link, & Mayer, 2006). Karena *corporate governance* merupakan hubungan antara berbagai pihak dalam menentukan arah dan kinerja dari perusahaan yang mana pihak utamanya adalah *shareholders*, manajemen dan dewan direksi (Monks dan Minow 2004 dalam Lukviarman,2016).

Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) (2009), *Corporate governance* adalah struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Peran utama *corporate governance* adalah mengurangi perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara berbagai pihak di perusahaan. Antara manajemen dan pemegang saham kerap kali terjadi perbedaan kepentingan dalam rangka memaksimalkan kepentingannya masing-masing contohnya adalah tingkat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Annissa & Kurniasih (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari *corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang membuktikan bahwa kualitas auditor independen perusahaan memberikan pengaruh kepada praktik *tax avoidance*. Santoso & Muid (2014) menemukan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap keputusan *tax avoidance* perusahaan. Dalam penelitian ini, akan digunakan kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional sebagai proksi untuk variabel *corporate governance*.

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan dari berbagai sektor, satu diantaranya adalah perusahaan manufaktur. Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama pendapatan dan keuntungan setinggi-tingginya (Sukirno & Husin, 2004). Keuntungan

atau laba perusahaan yang tinggi akan otomatis meningkatkan nilai perusahaan, kinerja keuangan serta kesejahteraan dan aset pemegang saham perusahaan tersebut (Brigham & Houston, 2010). Untuk mempermudah para investor menilai sejauh mana kinerja keuangan dari satu perusahaan, digunakan rasio-rasio yang satu diantaranya merupakan rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran pencapaian kinerja keuangan perusahaan dalam hal perolehan laba pada tingkat tertentu yang dapat di terima. Tingkat profitabilitas dilihat oleh investor dan penanam modal karena dianggap dapat memberikan representasi mengenai sejauh mana pengembalian dari investasi yang ditanamkan. *Return on Asset* (ROA) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan.

ROA merupakan pengukuran akuntansi yang lebih relevan apabila digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan jika dibandingkan dengan pengukuran berbasis pasar (Hassan & Halbouni, 2013). Tingkat laba bersih yang tinggi dapat menjadi satu indikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik khususnya dibidang keuangannya dan ROA berkaitan dengan jumlah laba bersih dan beban pajak penghasilan perusahaan tersebut. (Kurniasih & Sari, 2013). Berdasarkan teori agensi, laba perusahaan akan berusaha ditingkatkan oleh *agent* demi membuat citra keuangan yang baik di mata investor. Pajak penghasilan akan bertambah seiring dengan peningkatan jumlah laba dan diikuti dengan kecenderungan perusahaan untuk melangsungkan praktik *tax avoidance*. Mengingat masing-masing pihak terutama agent tetap ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Pada penelitiannya, Hassan & Halbouni (2013) menganalisis dampak dari *corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan mendapatkan hasil jumlah dewan mempengaruhi ROA. Darmawan & Sukartha (2014) menemukan adanya pengaruh signifikan dari ROA terhadap *tax avoidance* berbeda dengan Maharani & Suardana (2014), Kurniasih & Sari (2013) yang mengemukakan adanya pengaruh negatif dari ROA terhadap *tax avoidance*

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih yang selanjutnya disebut sebagai *principal* melibatkan orang lain yang disebut sebagai *agent* untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka (*principal*) dan melibatkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent*. *Principal* adalah pemegang saham, investor atau pemilik perusahaan dan *agent* merupakan manajemen atau individu yang mengelola dan menjalankan perusahaan. Dalam praktiknya, keselarasan hubungan dalam pendelegasian wewenang sulit tercipta karena adanya *conflict of interest* yang nantinya akan berujung pada *agency problem*. *Agency problem* menimbulkan *agency cost* yang terdiri dari 1) *monitoring cost*; 2) *bonding cost*; dan 3) *residual loss*.

Implementasi di dunia bisnis, ada mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada *agency theory* yaitu *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap *agent* (manajemen) dalam mengelola kekayaan *principal* (pemilik) sehingga *principal* lebih percaya dan yakin bahwa *agent* tidak melakukan suatu kecurangan untuk kepentingan pribadinya (Anggit & Shodiq, 2014).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kualitas Audit Sebagai Proksi dari *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Pengukuran kualitas audit pada penelitian ini menggunakan proksi dari kapabilitas dan reputasi KAP yang mengaudit suatu perusahaan terkait. Di Indonesia ada empat KAP yang disebut *The Big-4* yaitu adalah PwC, Deloitte, EY dan KPMG yang dianggap memiliki kapabilitas lebih tinggi dan reputasi lebih baik dibandingkan dengan KAP lainnya. Jika perusahaan di audit oleh salah satu KAP *The Big-4*, perusahaan tersebut akan semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif (Annisa & Kurniasih, 2012), karena KAP *The Big4* memiliki reputasi yang baik dan dapat dipastikan akan melakukan *service* serta menghasilkan laporan yang berkualitas.

H_1 : Kualitas Audit sebagai proksi dari *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Proksi dari *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen menurut Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah komisaris dari pihak luar. Dijelaskan juga pada pasal tersebut bahwa komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki relasi dengan pemegang saham utama dan anggota *top management* lainnya. Fungsi dari komisaris independen adalah melakukan supervisi terhadap jalannya operasional perusahaan dan kinerja manajemen. Selain itu komisaris independen memiliki tugas pokok untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* seperti bertindak sebagai penjamin perusahaan melakukan transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, tercantum jumlah komisaris independen masing-masing perusahaan minimal 30% dari jumlah total dewan komisaris. Winata (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan, akan semakin tinggi independensi perusahaan dan secara tidak langsung akan menekan praktik *tax avoidance*.

H_2 : Proporsi dewan komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governnce* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional Sebagai Proksi dari *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh lembaga lain memiliki fungsi pengawasan eksternal terhadap perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, pengawasan eksternal terhadap perusahaan dianggap semakin optimal dan konflik antar manajemen dapat dihindari. Seperti yang di katakan Shleifer dan Vishny (1986) perihal memantau, mendisplinkan dan mempengaruhi manajer dilakukan oleh pemilik institusional karena berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki oleh pemilik institusional mereka dapat memaksa mamajer untuk fokus pada kinerja ekonomi perusahaan.

H₃ : Kepemilikan Institusional Sebagai Proksi dari *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini kinerja keuangan di proksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. ROA adalah rasio yang digunakan sebagai ukuran dari tingkat pengembalian aset perusahaan. Jika tingkat ROA yang dimiliki perusahaan tinggi, dapat dipastikan kinerja keuangan perusahaan tersebut semakin baik dan memiliki laba yang besar. Jika tingkat ROA perusahaan tinggi, dapat diasumsikan praktik *tax avoidance* tidak dilakukan di perusahaan tersebut karena pajak dan pendapatannya sudah diatur seefisien mungkin (Maharani & Suardana 2014).

H₄ : Kinerja Keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan uji hipotesis dengan objek penelitian perusahaan manufaktur. Perusahaan yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah 1) Perusahaan termasuk kedalam sektor manufaktur dan terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016 2) Perusahaan memiliki kelengkapan data pada laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun 2014 sampai 2016 3) Perusahaan menggunakan mata uang rupiah untuk laporan keuangan dan laporan tahunannya 4) tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Data penelitian ini berupa data sekunder yang di dapat dari *website Indonesian Stock Exchange* dan *website* perusahaan terkait. Total sampel penelitian ini sebanyak 198 sampel.

Variabel Dependen

Tax Avoidance merupakan variabel dependen dalam penelitian ini dan di proksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

$$CETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

$$CETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Variabel Independen

Corporate Governance diproksikan oleh kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Kinerja keuangan diproksikan oleh *Return on Assets (ROA)*.

Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit pada penelitian ini menggunakan proksi dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan merupakan variabel dummy, 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* (PwC, EY, Deloitte dan KPMG) dan 0 jika diaudit oleh KAP *non The Big four* (Annisa & Kurniasih, 2012).

Kepemilikan Institusional

$INST = \text{Saham yang dimiliki institusi} / \text{Jumlah total saham yang beredar}$

$$INST = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah total saham yang beredar}}$$

Proporsi Dewan Komisaris Independen

$DKI = \text{Jumlah Komisaris Independen} / \text{Total Jumlah Anggota Komisaris}$

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Anggota Komisaris}}$$

Kinerja Keuangan

$ROA = \text{Earning After Tax} / \text{Total Assets}$

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Model Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang menggabungkan jenis data *crosssection* dan *data time series*. Uji yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji pemilihan model dan uji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi *Eviews9*. Adapun model penelitian yang akan diuji menggunakan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$ETR = a + b_1KA + b_2INST + b_3DKI + b_4ROA + e \quad \dots\dots(1)$$

$$CETR = a + b_1KA + b_2INST + b_3DKI + b_4ROA + e \quad \dots\dots(2)$$

ETR : *Effective Tax Rate* (proksi dari tax avoidance)

CETR : *Cash Effective Tax Rate* (proksi dari tax Avoidance)

KA : Kualitas Audit

INST : Kepemilikan Institusional

DKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

ROA : *Return on Assets*

a : Konstanta

b : koefisien regresi

e : *error term*

Pemilihan Metode Pengolahan Data

Pengujian data panel, diperlukan uji pemilihan model sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Uji ini dilakukan untuk memilih apakah *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang tepat untuk penelitian. Uji yang dilakukan adalah *Chow Test* dan *Hausman test*. Dari uji yang sudah dilakukan maka ditetapkan untuk kedua model menggunakan *Random Effect Model*.

Metode Analisis Data

Metode analisis untuk penelitian ini adalah pengujian hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji t dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis Model 1 (ETR)

Tabel 1.

R-Squared (ETR)	0.0427
Adjusted R-Squared	0.0229
F-Statistic	2.1561
Prob. (F-Statistic)	0.0754

Sumber : data sekunder yang diolah, 2018

Tax Avoidance pada model 1 diprosikan oleh ETR dan variabel independennya dapat menjelaskan sebesar 2,2% nilai *tax avoidance* tersebut. Sedangkan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian menjelaskan 97,8 % sisanya. Nilai *probability F-Statistic* model 1 sebesar $0.0754 < 0,1$ dan artinya seluruh variabel independen yang digunakan pada model 1 berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya yaitu ETR dengan tingkat signifikansi 10%.

Hasil Uji Regresi Model 1 (ETR)

Tabel 2.

Var.	Coef.	t-Stat.	Prob (ETR)
INST	-0.0166	-0.1664	0.8679
ROA	-0.5097	-2.5679	0.0110
DKI	0.1715	1.0728	0.2847
KA	-0.0262	-0.5579	0.5775
C	0.2862	3.0879	0.0023

Sumber : data sekunder yang diolah,2018

Hasil analisis regresi untuk model 1 dapat dituliskan sebagai berikut :

$$ETR = 0.2862 - 0.0262KA - 0.0166INST + 0.1715DKI - 0.5097ROA$$

Kualitas audit memiliki *t-statistic* -0,5579 dengan nilai probabilitas 0.5775 > 0.1 yang berarti kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR sehingga H_1 untuk model 1 ditolak. Hasil uji regresi Proporsi dewan komisaris independen memiliki *t-statistic* 1.0728 dengan nilai probabilitas 0.2847 > 0.1 yang artinya tidak signifikan dan H_2 untuk model 1 ditolak. Kepemilikan institusional memiliki *t-statistic* sebesar -0.1664 dengan nilai probabilitas sebesar 0,867 > 0,1 yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan H_3 untuk model 1 ditolak. Kinerja keuangan memiliki *t-statistic* sebesar -2.567 dengan nilai probabilitas 0,011 < 0,1 yang berarti kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR dan sesuai dengan hipotesis yang sudah disusun sebelumnya sehingga H_4 untuk model 1 diterima.

Hasil Uji Hipotesis Model 2 (CETR)

Tabel 3.

R-Squared (CETR)	0.0448
Adjusted R-Squared	0.0250
F-Statistic	2.2642
Prob. F-Statistic	0.0637

Sumber : data sekunder yang diolah,2018

Hasil *Adjusted R-Squared* untuk model 2 sebesar 0,025. *Tax Avoidance* untuk model 2 diproksikan oleh CETR yang mana 2,5 % nilai *tax avoidance* tersebut dapat dijelaskan oleh variabel independennya sedangkan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian menjelaskan 97,5% sisanya. Hasil *probability* uji F untuk model 2 sebesar $0,06 < 0,1$ yang memiliki arti bahwa secara simultan seluruh variabel independennya berpengaruh kepada CETR sebagai variabel depedennnya. Persamaan regresi untuk model 2 berdasarkan hasil yang terdapat pada table 4 dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{CETR} = 0.4462 - 0.0456\text{KA} - 0.0242\text{INST} + 0.0808\text{DKI} - 0.7829\text{ROA}$$

Hasil Uji Regresi Model 2 (CETR)

Tabel 4.

Variable	Coefficient	t-stat.	Prob. (CETR)
INST	-0.0242	-0.1646	0.8694
ROA	-0.7829	-2.6500	0.0087
DKI	0.0808	0.3392	0.7348
KA	-0.0456	-0.6586	0.5109
C	0.4462	3.2564	0.0013

Sumber : data sekunder yang diolah,2018

Hasil uji t atau uji parsial, variabel kualitas audit memiliki *t-statistic* sebesar -0,6586 dan nilai probabilitas $0,5109 > 0,1$ maka kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR sehingga H_1 untuk model 2 ditolak. Variabel proporsi dewan komisaris indepeden memiliki *t-statistic* sebesar 0.3392 dan nilai probabilitas $0,7348 > 0,1$ yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari variabel proporsi dewan komisaris independen terhadap CETR, maka H_2 untuk model 2 ditolak. Untuk variabel kepemilikan institusional memiliki *t-statistic* sebesar -0.1646 dan nilai probabilitas $0,8694 > 0,1$ yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dan H_3 untuk model 2 ditolak. Sedangkan variabel kinerja keuangan memiliki *t-statistic* sebesar -2.6500 dengan signifikansi $0,008 < 0,1$ yang menandakan kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap CETR dengan hubungan negatif, maka

dapat disimpulkan H_4 untuk model 2 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitiannya, Kurniasih dan Sari (2012) mengatakan bahwa semakin besar KAP yang mengaudit sebuah perusahaan, tingkat independensinya semakin tinggi dan penghindaran pajak akan semakin terhindari. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Tidak adanya perbedaan yang nyata antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big-4* dan non *Big-4* dikarenakan semua auditor berpedoman pada standard yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ketika melakukan tugasnya. Sehingga ukuran KAP dan reputasinya tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam manajemen pajaknya.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Sebagai pihak eksternal yang dianggap netral, dewan komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali sehingga dapat mengawasi kinerja perusahaan dan melakukan implementasi dari *good corporate governance*. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Fadhillah (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari proporsi dewan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance* di perusahaan. Menurut Fadhillah (2014), besarnya jumlah komisaris independen tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan praktik *tax avoidance* dikarenakan tidak semua dewan komisaris dapat menunjukkan independensinya dalam melakukan pengawasan di perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji regresi model 1 dan model 2 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih dan Waluyo et.al (2014). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga lain yang memiliki wewenang mengawasi kinerja manajemen (Jasmine, 2017). Tetapi dalam praktiknya kepemilikan institusional tidak memberikan dampak yang berarti untuk menekan praktik penghindaran pajak karena penerapan kebijakan pajak yang baik merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Meskipun menurut *agency theory*, semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan control dari eksternal semakin tinggi.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 2 dan 4 menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* yang di proksikan oleh ETR dan CETR. Maharani dan Suardhana (2014) mendapatkan hasil yang sama pada penelitiannya dan menyatakan bahwa ROA sebagai pengukur profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Tanda negatif dapat diartikan ketika ROA meningkat, maka *tax avoidance* akan menurun. Karena menurut Kurniasih dan Sari (2013), ketika perusahaan memiliki ROA yang tinggi dapat dipastikan memiliki laba yang tinggi pula. Tingginya tingkat laba suatu perusahaan, membuat perusahaan tersebut diasumsikan telah melakukan perencanaan pajak yang optimal sehingga aktivitas *tax avoidance* cenderung menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari *corporate governance* dengan kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen serta kepemilikan institusional sebagai proksinya dan kinerja keuangan terhadap ETR dan CETR sebagai proksi dari *tax avoidance*. Penelitian menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel dan dua model yang memiliki variabel dependen berbeda untuk diuji dengan uji regresi berganda.

Hasil dari penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan hasil uji dari kedua model meskipun ETR dan CETR memiliki cara hitung yang berbeda. Hasil dari penelitian ini adanya pengaruh signifikan dengan hubungan bersifat negatif dari ROA yang digunakan sebagai pengukuran dari kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* yang diukur oleh ETR dan CETR. Arti dari hubungan yang bersifat negatif adalah jika perusahaan memiliki tingkat ROA tinggi maka tingkat praktik *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut akan rendah atau menurun karena perusahaan sudah berhasil melakukan perencanaan dan manajemen pajak secara optimal. Variabel-variabel yang digunakan sebagai proksi dari *corporate governance* tidak menunjukkan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan dibuktikan dengan hasil uji regresi yang tidak signifikan.

SARAN

Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya adalah kemampuan data penelitian yang hanya mampu mengakomodasi signifikansi pada tingkat 10%. Saran untuk penelitian berikutnya adalah penggunaan data yang dapat mengakomodasi tingkat signifikansi pada 5% atau 1% sehingga hasil dari penelitian memiliki signifikansi yang lebih kuat dari penelitian sebelumnya. Praktik *tax avoidance* dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak variabel selain yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya angka koefisien determinasi baik untuk model 1 maupun model 2. Saran untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi sehingga dapat menghasilkan angka koefisien determinasi yang tinggi sehingga menghasilkan penelitian yang semakin baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggit, D. T., & Shodiq, M. J. 2014. Hubungan Antara Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *SNA 17 Mataram, Lombok*.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 123-136.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. 2015. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. 2010. *Fundamentals of Financial Management, Dasar-dasar manajemen keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, I. G., & Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Asset dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 143-161.
- Darussalam, & Septriadi, D. 2009, Jan 14. *Tax Avoidance Tax Planning, Tax Evasion dan Anti Avoidance Rule*. Retrieved from http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=&q=&hlm=6#_ftn5
- Dijerja, G. 2017, Februari 28. *Realisasi APBN Per 31 Desember 2016*. Retrieved from

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI: <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisa-si-apbn/2599-realisa-si-apbn-per-31-desember-2016.html>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & L. Maydew, E. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *American Accounting Sociation*, 1163-1189.
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance.
- Friese, A., Link, S., & Mayer, S. 2006. Taxation and Corporate Governance, Working Paper.
- Hassan, M. K., & Halbouni, S. S. 2013. Corporate governance, economic turbulence and financial performance of UAE listed. *Studies in Economics and Finance Vol. 30*, 118-138.
- Jasmine, U. 2017. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon Vol. 4 Februari*, 1786-1800.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Kurniasih, T., & Sari, M. R. 2013. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *BULETIN STUDI EKONOMI*.
- Lukviarman, N. 2016. Corporate Governance Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia. In N. Lukviarman, *Corporate Governance Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia* (p. 20). Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Maharani, I. G., & Suardana, K. A. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 525-539.
- Ortax. 2016, Maret 10. Retrieved from Ortax.org: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=79>
- Perkasa, A. (n.d.). Retrieved from <http://kabar24.bisnis.com/read/20151020/16/483882/penghindaran-pajak-ppatk-did-esak-telusuri-dana-4.000-perusahaan-modal-asing>
- Santoso, T. B., & Muid, D. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy*.
- Sukirno, S., & Husin, W. S. 2004. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, T. M., Muthia, Y., & Rusli. 2014. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusioanl Terhadap Penghindaran Pajak.
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efeke Indonesia Tahun 2013. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014*.